

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Apa Kabar Pansus Mikrosel?

### Anggota DPRD dan Pengamat Pandang Perlu Dibentuk Kembali

JAKARTA—Panita khusus mikrosel pernah terbentuk di DPRD DKI pada periode. Namun pembentukan pansus tersebut mangkrak hingga masa bakti DPRD DKI 2014-2019 berakhir. Padahal awal pembentukan pansus tersebut begitu menggebu-gebu karena adanya dugaan kerugian keuangan DKI mencapai triliunan rupiah.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI M. Taufik Zoelkifli mengatakan pansus mikrosel tersebut terbentuk sebelum dirinya menjadi anggota DPRD DKI. Dirinya tidak tahu apa kendala pansus mikrosel tersebut. "Ketua Pansus Waktu itu Haji Lulung tetapi sekarang Pak Haji Lulungnya ke DPR Pusat. Kemudian yang focal masalah tersebut Pak Ongen dari Hanura sekarang Hanuranya sudah tidak masuk lagi," ujar Taufik, di Jakarta, Senin (10/2/2020)..

Namun dirinya mengaku sedikit banyak tahu kasus tersebut. Taufik mengakui, kini isu kelanjutan pansus mikrosel tersebut masih sepi dibicarakan di DPRD DKI. "Mungkin karena fokus anggota DPRD DKI yang sekarang belum ke situ,"

Kendati begitu Taufik memandang persoalan ribuan tower mikrosel yang berdiri di lahan Pemprov DKI adalah sesuatu yang penting untuk diselesaikan. "Karena ini potensi PAD (pendapatan asli daerah) yang tak masuk ke APBD DKI," ungkapnya.

Taufik memandang masih diperlukan dibentuk kembali pansus mikrosel. Karena hal tersebut sebagai upaya menyeleamatkan potensi PAD DKI dalam jumlah besar. "Komisi C sebenarnya juga sudah membicarakan tentang aset-aset daerah. "Mungkin sekarang timingnya saja yang belum

pas, karena dewan sakarang lagi sibuk dengan pansus tatib untuk cawagub DKI. Jadi fokus teman-teman di DPRD belum ke sana (pansus mikrosel)," ulasnya.

Menurutnya, kemungkinan setelah selesai dengan cawagub DKI anggota dewan akan kembali membahas pansus mikrosel. Apakah Fraksi PKS akan menginiasi pembentukan kembali pansus mikrosel? "Bukan kapasitas saya menjawab untuk itu karena ada ketua fraksi dan nanti bisa rembukan membicarakan hal ini. Tetapi untuk saya pribadi saya kira layak dibentuk pansus," cetunya.

Senada dengan Taufik, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah sepakat masih diperlukan pansus mikrosel. "Karena masalah tersebut belum jelas dan belum mendapat mapping-nya. Kan tower tower mikrosel berdiri di tanah milik Pemprov DKI. Selama ini belum diketahui apakah pemilik tower mikrosel bayar atau tidak kepada Pemrov DKI," kata Trubus.

"Seharusnya memang sewa tapi sekarang tidak tahu uangnya ke mana. Persoalannya di situ," cetusnya. Kasus tower mikrosel tersebut berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2017 menemukan 5,507 menara seluler dibangun sembilan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi yang semuanya bermasalah.

Temuan BPK itu, selain ada yang tidak memiliki Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PMK) atau Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai yang disepakati dengan Pemprov DKI. Ada ada yang tidak membayar sewa atas lahan milik Pemprov yang digunakan.

Atas kondisi ini, BPK menilai kalau keberadaan 5.507 menara selular yang berdiri dilahan milik Pemprov DKI tersebut melanggar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah,

melanggar Pergub DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pergub DKI Nomor 225 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah.

Di antara, sembilan perusahaan tersebut adalah PT Dayamitra tercatat memiliki 228 menara seluler, PT DAS memiliki 11 menara, PT BITTN memiliki 355 menara, PT BTS memiliki 3.338 menara, PT QI memiliki 12 menara, PT ISI memiliki 396 menara, PT MDC memiliki 400 menara, PT IBS memiliki 744 menara dan PT MTI memiliki 23 menara.

Atas temuan tersebut DPRD DKI periode 2014-2019 berinisiatif untuk membentuk pansus mikrosel. Namun dalam perjalannya setelah disetujui oleh pimpinan dewan, pasus tersebut mangkrak. (dni)